

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI

LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Uji Kompetensi Nomor 70/BA/KPM/LKPP/09/2022 tanggal 28 September

- 2022 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN

BARANG/JASA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya

sesuai dengan kategori akreditasi.

KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau

melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2022 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
- 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR;
- 4. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP;
- 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP; dan
- 6. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN

PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN

2022

NOMOR : 215 TAHUN 2022

TANGGAL: 4 NOVEMBER 2022

DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TERAKREDITASI

No	INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Balai Pengembangan	Medan	Terakreditasi	Berlaku 5
	Kompetensi PUPR Wilayah I		A	tahun sejak
	Medan			tanggal
				ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI